KOMUNIKASI POLITIK DALAM KOLABORASI PENTAHELIKS BAGI PEMBANGUNAN PARIWISATA KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT

RAJA S.Y
NPP. 33.0149
Program Studi Politik Indonesia Terapan
Email: kingrajasy@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Taslim Djafar, S.STP., M.Si.
Email: taslim@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement: *This was motivated by the suboptimal implementation of political communication in the pentahelix collaboration for tourism development in Sawahlunto City. The problem is reflected in the limited involvement of academics, inconsistent communication among stakeholders, and uneven dissemination of information.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the implementation of political communication and the efforts made to overcome communication barriers in tourism development in Sawahlunto City.* ***Method:*** *This study employed a descriptive qualitative method. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving government representatives, business actors, communities, media, academics, and society.* ***Result:*** *The results show that political communication in the pentahelix collaboration has not been fully optimal. The government remains the dominant actor, while academic involvement is still limited. Communication has been conducted through coordination meetings, socialization, and media utilization, but intensity and consistency remain insufficient. Public participation tends to increase when tourism activities provide economic benefits, although information distribution is still uneven.* ***Conclusion:*** *Efforts to overcome these barriers include strengthening coordination and optimizing communication media to support sustainable tourism development in Sawahlunto City.*

Keywords*: collaboration; pentahelix; political communication; Sawahlunto; tourism*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelelitian/*Research Gap*): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya komunikasi politik dalam kolaborasi pentaheliks bagi pembangunan pariwisata di Kota Sawahlunto, yang ditandai dengan masih terbatasnya keterlibatan akademisi, komunikasi antaraktor yang belum konsisten, serta penyebaran informasi yang belum merata. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi komunikasi politik serta upaya mengatasi hambatan komunikasi dalam pembangunan pariwisata di Kota Sawahlunto. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan unsur pemerintah, pelaku usaha, komunitas, media, akademisi, dan masyarakat. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi politik dalam kolaborasi pentaheliks belum berjalan optimal. Pemerintah masih menjadi aktor dominan, sedangkan keterlibatan akademisi masih terbatas. Komunikasi dilakukan melalui rapat koordinasi, sosialisasi, dan pemanfaatan media komunikasi, namun intensitas dan konsistensinya masih belum memadai. Partisipasi masyarakat cenderung meningkat ketika kegiatan pariwisata memberikan manfaat ekonomi, meskipun distribusi informasi masih belum merata. **Kesimpulan:** Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut meliputi penguatan koordinasi dan optimalisasi media komunikasi guna mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan di Kota Sawahlunto.

Kata kunci: kolaborasi; komunikasi politik; pariwisata; pentaheliks; Sawahlunto

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pembangunan pariwisata tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah sebagai aktor utama, melainkan membutuhkan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan yang memiliki peran dan sumber daya yang berbeda. Ansell dan Gash (2008) menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan melalui pendekatan *collaborative governance* sangat dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai aktor dalam proses kolaborasi yang mampu membangun komitmen, kepercayaan, dan koordinasi antar pemangku kepentingan.

Salah satu pendekatan yang berkembang dalam pembangunan pariwisata adalah model Pentaheliks yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media. Model ini menekankan pentingnya sinergi antaraktor dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan melalui kolaborasi yang terintegrasi. Nainggolan et al. (2020) menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan pariwisata sangat dipengaruhi oleh kemampuan para pemangku kepentingan dalam membangun kerja sama yang berkelanjutan melalui model pentaheliks.

Kota Sawahlunto merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata, terutama setelah ditetapkan sebagai Warisan Dunia UNESCO pada tahun 2019. Status tersebut menjadikan Kota Sawahlunto sebagai salah satu destinasi wisata unggulan yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang kuat. Pengembangan sektor pariwisata di Kota Sawahlunto memerlukan keterlibatan berbagai pihak karena

pembangunan pariwisata tidak hanya berkaitan dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan yang saling berkaitan.

Komunikasi politik memiliki peran penting dalam mendukung proses kolaborasi tersebut. Melalui komunikasi politik, pemerintah dan para pemangku kepentingan dapat membangun kesamaan persepsi, menyampaikan kebijakan, memperkuat koordinasi, serta membentuk dukungan terhadap program pembangunan yang dilaksanakan. Dalam konteks pembangunan pariwisata, komunikasi politik menjadi instrumen penting untuk menjembatani berbagai kepentingan yang muncul di antara aktor-aktor Pentaheliks sehingga tujuan pembangunan dapat dicapai secara efektif.

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh akademisi dan sivitas Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) menunjukkan pentingnya kolaborasi dan komunikasi dalam pembangunan pariwisata. Penelitian Nugroho dan Hilman (2020) dalam Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja menjelaskan bahwa pembangunan pariwisata berbasis *collaborative governance* memerlukan sinergi yang kuat antaraktor agar program pembangunan dapat berjalan secara efektif. Penelitian Zis et al. (2024) dalam Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau juga menunjukkan bahwa komunikasi kelompok memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan pariwisata berkelanjutan melalui penguatan partisipasi dan kerja sama antaranggota kelompok wisata. Selain itu, penelitian Salsabila dan Arifin (2025) dari Repository IPDN menunjukkan bahwa pengembangan ekowisata dengan model Pentaheliks membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media agar potensi wisata dapat berkembang secara optimal.

Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa pelaksanaan kolaborasi Pentaheliks dalam pembangunan pariwisata masih menghadapi berbagai kendala. Ardi dan Suswanta (2025) menemukan bahwa pemerintah masih menjadi aktor dominan dalam pembangunan pariwisata, sedangkan keterlibatan akademisi, media, dan sektor swasta masih relatif rendah. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Yuningsih et al. (2019) yang menjelaskan bahwa belum optimalnya kerja sama antaraktor menjadi salah satu hambatan dalam pengembangan pariwisata berbasis Pentaheliks.

Berdasarkan kondisi tersebut, pelaksanaan kolaborasi pentaheliks dalam pembangunan pariwisata Kota Sawahlunto masih menghadapi berbagai tantangan. Keterlibatan aktor Pentaheliks belum berjalan secara optimal karena masih terdapat dominasi pemerintah dalam berbagai program pembangunan pariwisata, sedangkan partisipasi akademisi masih terbatas. Selain itu, perbedaan kepentingan antaraktor, keterbatasan koordinasi, serta belum meratanya penyebaran informasi menjadi hambatan dalam membangun komunikasi politik yang efektif. Padahal, keberhasilan pembangunan pariwisata sangat dipengaruhi oleh kemampuan para pemangku kepentingan dalam membangun komunikasi dan kolaborasi yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komunikasi politik dalam kolaborasi pentaheliks bagi pembangunan pariwisata di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat serta mengidentifikasi upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor yang menghambat komunikasi politik antaraktor. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian komunikasi politik, *collaborative governance*, dan pembangunan pariwisata serta menjadi bahan

masukan bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam memperkuat kolaborasi guna mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

1.2. Kesenjangan Masalah (*Research Gap*)

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji kolaborasi pentaheliks dalam pengembangan pariwisata (Ardi & Suswanta, 2025; Daryana & Yudhistira, 2024) serta peran komunikasi pemerintah dalam pembangunan pariwisata daerah (Anwar, Surya & Resmawan, 2022), masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara spesifik mengkaji komunikasi politik dalam kerangka kolaborasi pentaheliks untuk pembangunan pariwisata di kota berbasis warisan budaya. Penelitian yang ada cenderung memfokuskan pada satu dimensi, baik dominasi aktor, dampak ekonomi, maupun peran media, tanpa mengintegrasikan analisis komunikasi politik secara menyeluruh.

Penulis berfokus pada permasalahan belum optimalnya komunikasi politik antaraktor pentaheliks dalam pembangunan pariwisata Kota Sawahlunto, yang ditandai dengan keterbatasan keterlibatan akademisi, inkonsistensi komunikasi, serta belum meratanya penyebaran informasi kepada seluruh pemangku kepentingan.

Secara lebih tegas, kesenjangan yang belum terjawab oleh penelitian-penelitian terdahulu terletak pada minimnya kajian yang memposisikan komunikasi politik sebagai faktor penentu efektivitas kolaborasi pentaheliks itu sendiri. Penelitian Ardi dan Suswanta (2025) maupun Daryana dan Yudhistira (2024) menjelaskan pola kolaborasi antaraktor, namun belum mengungkap bagaimana proses komunikasi politik—mencakup peran komunikator, kejelasan dan konsistensi pesan, pemanfaatan media, respons khalayak, serta efek yang ditimbulkan—dapat memperkuat atau justru menghambat keberlangsungan kolaborasi tersebut. Demikian pula penelitian Anwar, Surya, dan Resmawan (2022) berhenti pada strategi komunikasi pemerintah semata, tanpa menempatkannya dalam kerangka relasi lima aktor pentaheliks secara utuh. Kekosongan inilah yang diisi oleh penelitian ini, yaitu dengan menganalisis komunikasi politik sebagai variabel yang memengaruhi efektivitas kolaborasi pentaheliks dalam pembangunan pariwisata berbasis warisan budaya.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting untuk memberikan gambaran empiris mengenai implementasi komunikasi politik dalam kolaborasi pentaheliks bagi pembangunan pariwisata Kota Sawahlunto sebagai dasar perumusan strategi yang lebih efektif. Mengingat posisi strategis Kota Sawahlunto sebagai satu-satunya kota tambang warisan budaya UNESCO di Indonesia, optimalisasi komunikasi politik lintas aktor menjadi mendesak untuk meningkatkan daya saing destinasi dan mendorong pemulihan kunjungan wisatawan secara berkelanjutan. Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, pemerintah dan pemangku kepentingan akan kekurangan dasar empiris yang kuat dalam memperkuat koordinasi pentaheliks.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema komunikasi, pariwisata, dan kolaborasi pentaheliks. Berikut ringkasan penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan:

Tabel 1.
Penelitian Terdahulu

Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode	Landasan Teori	Persamaan	Perbedaan
Daryana & Yudhistira (2024)	*Integration of Pentahelix in Halal Culinary Business Tourism*	Deskriptif kualitatif	Model pentaheliks, ekosistem ekonomi kreatif halal	Penggunaan konsep pentaheliks dalam pengembangan pariwisata	Penelitian tersebut berfokus pada ekonomi kreatif halal; penelitian ini pada komunikasi politik dalam kolaborasi pentaheliks

Ardi & Suswanta (2025)	*Pentahelix Actor Collaboration: Government Dominance in North Lombok (Jurnal INJECT)*	Kualitatif	Teori kolaborasi Pentaheliks	Mengkaji kolaborasi antaraktor pentaheliks	Penelitian tersebut menekankan dominasi pemerintah; penelitian ini fokus pada komunikasi politik
Zerah, Tahirs & Marchelin (2024)	Dampak Ekonomi Pariwisata terhadap Kesejahteraan Masyarakat Lokal di Ke'te Kesu	Kuantitatif	Pariwisata berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat	Persamaan pada sektor pariwisata	Penelitian tersebut berfokus pada dampak ekonomi; penelitian ini pada komunikasi politik dalam kolaborasi pentaheliks
Junaedi dkk (2025)	Peran Media Sosial dalam Membentuk Citra Destinasi Pariwisata Kabupaten Bondowoso	Deskriptif kualitatif	Media sosial dan pembentukan citra destinasi	Membahas aspek komunikasi pariwisata	Penelitian ini mengkaji kolaborasi pentaheliks, sedangkan penelitian tersebut hanya berfokus pada peran media
Sari & Purnomo (2021)	Efektivitas *Usability Sign System* Tempat Wisata Kota Sawahlunto	Deskriptif kualitatif	Teori komunikasi visual, semiotika, konsep sistem *signage*	Persamaan pada lokasi penelitian di Sawahlunto	Penelitian tersebut menitikberatkan pada komunikasi visual; penelitian ini pada komunikasi politik
Anwar, Surya & Resmawan (2022)	*Communication Strategy of East Kalimantan Government on Tourism Development*	Kualitatif deskriptif	Strategi komunikasi, komunikasi pembangunan, komunikasi pemerintah	Persamaan komunikasi dalam pembangunan pariwisata	Penelitian ini mengkaji komunikasi politik dalam kolaborasi pentaheliks; penelitian tersebut pada strategi komunikasi pemerintah

Sumber: Diolah peneliti dari berbagai sumber, 2025

Berdasarkan rangkuman di atas, penelitian yang ada menunjukkan variasi fokus mulai dari kolaborasi pentaheliks, peran media, strategi komunikasi pemerintah, hingga dampak ekonomi pariwisata. Penelitian ini berbeda karena secara khusus membahas komunikasi politik dalam kolaborasi pentaheliks yang mencakup seluruh dimensi komunikasi (komunikator, pesan, media, khalayak, dan efek) dalam konteks kota berbasis warisan budaya UNESCO.

Secara umum, keterbatasan penelitian-penelitian terdahulu terletak pada cakupan analisis yang parsial: penelitian Daryana dan Yudhistira (2024) serta Aribowo dkk. (2018) terbatas pada deskripsi peran masing-masing aktor tanpa mengurai proses komunikasi yang menghubungkannya; penelitian Ardi dan Suswanta (2025) berhenti pada identifikasi dominasi aktor tanpa menjelaskan mekanisme komunikasi politik yang mendasarinya; sementara penelitian Sari dan Purnomo (2021) serta Junaedi dkk. (2025) hanya menyoroti aspek komunikasi visual dan media sosial secara terpisah dari kerangka kolaborasi pentaheliks secara menyeluruh. Kekosongan kajian inilah yang diisi oleh penelitian ini melalui analisis komunikasi politik secara komprehensif berdasarkan lima dimensi sekaligus, sehingga memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai bagaimana komunikasi membentuk, memperkuat, atau menghambat kolaborasi pentaheliks dalam pembangunan pariwisata berbasis warisan budaya.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini merupakan penelitian baru dilihat dari sisi konteks objek penelitian, yaitu komunikasi politik dalam kolaborasi pentaheliks untuk pembangunan pariwisata berbasis warisan dunia UNESCO. Metode deskriptif kualitatif dengan analisis mendalam berbasis Teori Komunikasi Politik Nimmo (2000) yang mencakup lima dimensi

(komunikator, pesan, media, khalayak, dan efek) membedakan penelitian ini dari kajian sebelumnya yang umumnya hanya mengkaji satu atau dua dimensi. Selain itu, lokus penelitian di Kota Sawahlunto sebagai kota pertambangan bersejarah yang unik menjadi kebaruan tersendiri.

Dari sisi pendekatan analisis, kebaruan penelitian ini terletak pada penempatan komunikasi politik bukan sekadar sebagai deskripsi peran aktor, melainkan sebagai variabel penjelas yang dianalisis secara sistematis melalui lima indikator sekaligus, yaitu komunikator politik, pesan politik, media/saluran komunikasi, khalayak/publik, dan efek komunikasi politik, yang masing-masing ditelusuri keterkaitannya dengan dinamika kolaborasi pentaheliks. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya penerapan Teori Komunikasi Politik Nimmo (2000) pada ranah tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) berbasis pentaheliks, yang sebelumnya lebih banyak dikaji melalui pendekatan manajemen pariwisata atau ekonomi kreatif. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan kontribusi berupa pemetaan hambatan komunikasi antaraktor secara lebih rinci, yang dapat menjadi dasar perumusan strategi komunikasi politik yang lebih inklusif bagi Pemerintah Kota Sawahlunto dan aktor pentaheliks lainnya

1.6. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi komunikasi politik dalam kolaborasi pentaheliks bagi pembangunan pariwisata Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat dan menganalisis upaya mengatasi hambatan komunikasi dalam kolaborasi tersebut.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dipilih karena fenomena komunikasi politik antaraktor pentaheliks merupakan permasalahan yang bersifat dinamis, kontekstual, dan memerlukan pemahaman mendalam yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui angka-angka. Pendekatan ini dinilai paling tepat untuk menggambarkan proses, makna, dan dinamika interaksi antaraktor secara holistik (Sugiyono, 2022; Creswell, 2018).

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik. Pertama, wawancara mendalam terhadap 11 informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, kewenangan, serta keterlibatan langsung dalam pembangunan pariwisata Kota Sawahlunto. Informan terdiri atas Wali Kota Sawahlunto yang dipilih karena memiliki kewenangan sebagai pengambil kebijakan daerah; Ketua Komisi DPRD Bidang Pariwisata karena memiliki fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap kebijakan pariwisata; Pejabat Dinas Pariwisata (Meldi Hidayat Marta, S.STP., M.Si.) sebagai informan kunci karena memiliki tugas pokok dan fungsi dalam perencanaan, koordinasi, serta pelaksanaan program pembangunan pariwisata; tiga pelaku usaha yang dipilih karena berperan sebagai pelaksana aktivitas ekonomi dan mitra pemerintah dalam pengembangan destinasi wisata; akademisi karena memiliki kapasitas keilmuan serta berperan memberikan masukan ilmiah dalam pembangunan pariwisata; media lokal karena berfungsi sebagai penyebar informasi sekaligus pembentuk opini publik mengenai kebijakan pariwisata; POKDARWIS karena berperan sebagai penggerak partisipasi masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata; pengelola destinasi wisata karena memiliki pengalaman operasional secara langsung dalam pengelolaan objek wisata; serta masyarakat sebagai penerima manfaat sekaligus pihak yang merasakan dampak implementasi kebijakan pembangunan pariwisata.

Kedua, observasi nonpartisipan dilakukan secara langsung pada lokasi destinasi wisata dan kegiatan koordinasi antaraktor untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pola komunikasi, interaksi, dan pelaksanaan kolaborasi pentaheliks. Ketiga, dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan berbagai dokumen pendukung, seperti peraturan daerah, laporan kegiatan, notulen rapat, serta dokumentasi visual yang relevan dengan fokus penelitian.

Teknik pengujian keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan

membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai kelompok informan, triangulasi teknik melalui penggunaan wawancara, observasi, dan dokumentasi secara bersamaan, serta *member check* untuk memastikan kesesuaian hasil interpretasi peneliti dengan informasi yang diberikan oleh informan. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Penelitian dilaksanakan di Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, selama kurang lebih dua bulan, yaitu pada bulan Maret hingga April 2026. Rentang waktu tersebut mencakup observasi awal, pelaksanaan wawancara mendalam, observasi lapangan, serta pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan pembangunan pariwisata di Kota Sawahlunto.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis komunikasi politik dalam kolaborasi pentaheliks bagi pembangunan pariwisata Kota Sawahlunto menggunakan Teori Komunikasi Politik Nimmo (2000) yang mencakup lima dimensi: komunikator politik, pesan politik, media/saluran komunikasi, khalayak/publik, dan efek komunikasi politik.

3.1. Komunikasi Politik dalam Kolaborasi Pentaheliks

Kolaborasi pentaheliks dalam pembangunan pariwisata Kota Sawahlunto melibatkan lima unsur utama, yaitu pemerintah, akademisi, bisnis/pelaku usaha, komunitas, dan media. Penelitian ini menganalisis bagaimana komunikasi politik antarkelima aktor tersebut berjalan dalam praktiknya melalui lima dimensi berikut:

Tabel 2.

Ringkasan Temuan Komunikasi Politik dalam Kolaborasi Pentaheliks

Dimensi Komunikasi Politik	Temuan Penelitian
Komunikator Politik	Pemerintah (Walikota, DPRD, Dinas Pariwisata) berperan sebagai pengarah, koordinator, pengambil kebijakan, dan pelaksana promosi. Pelaku usaha sebagai penyedia layanan dan fasilitas pendukung. Media lokal sebagai penyampai informasi kepada publik. Komunitas (POKDARWIS) sebagai perantara aspirasi masyarakat. Akademisi belum terlibat secara konsisten.
Pesan Politik	Pesan yang disampaikan sudah cukup jelas dan relevan dengan isu pengembangan pariwisata *heritage*. Namun konsistensi pesan antaraktor masih bervariasi; penyampaian langsung lebih efektif dibandingkan melalui media digital.
Media/Saluran Komunikasi	Media yang digunakan beragam: rapat koordinasi, media sosial (Instagram @sawahluntotourism), radio lokal, dan komunikasi langsung. Namun pemanfaatannya belum optimal untuk menjangkau seluruh pihak secara merata.
Khalayak/Publik	Partisipasi masyarakat meningkat ketika kegiatan pariwisata memberikan manfaat ekonomi langsung. Namun akses dan pemahaman terhadap informasi masih belum merata, terutama di kalangan kelompok usia lanjut.
Efek Komunikasi Politik	Komunikasi yang terjalin belum sepenuhnya meningkatkan kesepahaman, partisipasi, dan kepercayaan antaraktor secara menyeluruh. Diperlukan penguatan koordinasi dan strategi komunikasi yang lebih inklusif.

Sumber: Diolah peneliti, 2026

3.1.1 Komunikator Politik

Komunikator politik dalam konteks pembangunan pariwisata Kota Sawahlunto didominasi oleh pemerintah, khususnya Dinas Pariwisata sebagai perencana, pengelola, dan pelaksana promosi. Wawancara dengan Walikota Sawahlunto mengungkapkan bahwa "Pemerintah berperan sebagai pengarah, koordinator, dan pengambil kebijakan dalam

pengembangan pariwisata berbasis sejarah tambang, sekaligus memfasilitasi sinergi antaraktor untuk mewujudkan visi kota wisata tambang yang berbudaya."

Temuan penelitian menunjukkan bahwa seluruh unsur pentaheliks kecuali akademisi telah menjalankan peran komunikasinya. Intensitas komunikasi antaraktor bersifat situasional, meningkat saat pelaksanaan *event* atau kegiatan pariwisata. Keterbatasan keterlibatan akademisi disebabkan oleh minimnya institusi pendidikan tinggi di wilayah tersebut serta belum adanya platform kolaborasi yang memfasilitasi peran akademisi secara berkelanjutan.

Terbatasnya peran akademisi membawa dampak ganda terhadap pembangunan pariwisata dan komunikasi politik antarpemangku kepentingan. Pada aspek pembangunan pariwisata, ketiadaan masukan akademik yang berkelanjutan menyebabkan perencanaan dan evaluasi program cenderung bersifat teknis-administratif, tanpa diimbangi kajian ilmiah mengenai dampak jangka panjang, daya dukung lingkungan, maupun keberlanjutan ekonomi destinasi warisan tambang. Pada aspek komunikasi politik, absennya akademisi sebagai pihak yang relatif netral mengurangi ketersediaan perspektif independen yang dapat menjembatani perbedaan kepentingan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, sehingga komunikasi antaraktor cenderung berlangsung satu arah dari pemerintah tanpa diimbangi telaah kritis dari pihak akademik. Kondisi ini memperkuat dominasi pemerintah sebagai komunikator tunggal dan memperlambat terbentuknya kesepahaman bersama mengenai arah pembangunan pariwisata Kota Sawahlunto.

3.1.2 Pesan Politik

Pesan politik yang disampaikan pemerintah berisi ajakan menjaga warisan budaya, mendukung program pariwisata kota tambang, dan mengikuti program pengembangan destinasi. Pesan tersebut dinilai sudah cukup jelas dan relevan dengan kondisi lapangan. Namun, wawancara dengan pelaku usaha kuliner mengindikasikan bahwa "informasi yang kurang jelas menyebabkan adanya sikap menunggu sebelum mengambil tindakan," menunjukkan bahwa konsistensi pesan antaraktor masih perlu ditingkatkan.

3.1.3 Media/Saluran Komunikasi

Media komunikasi yang digunakan mencakup rapat koordinasi formal, media sosial (@sawahluntotourism), radio lokal, serta komunikasi langsung/tatap muka. Pejabat Dinas Pariwisata menyatakan bahwa "intensitas komunikasi cenderung aktif, terutama pada saat pelaksanaan *event* pariwisata, serta didukung pemanfaatan media sosial sebagai sarana promosi." Namun, efektivitas media masih bervariasi karena sebagian masyarakat lebih mudah dijangkau melalui komunikasi langsung.

3.1.4 Khalayak/Publik

Partisipasi masyarakat Kota Sawahlunto dalam pembangunan pariwisata bersifat responsif terhadap manfaat ekonomi langsung. Wawancara dengan perwakilan komunitas (POKDARWIS) menunjukkan bahwa masyarakat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pariwisata ketika merasakan dampak positifnya. Namun, distribusi informasi masih belum merata, khususnya di kalangan kelompok usia lanjut dan komunitas yang kurang terjangkau sosialisasi.

3.1.5 Efek Komunikasi Politik

Efek komunikasi politik yang terukur meliputi meningkatnya dukungan sebagian masyarakat terhadap program pariwisata dan terbentuknya kolaborasi antaraktor meskipun belum merata. Namun, masih terdapat perbedaan persepsi yang menyebabkan partisipasi belum optimal. Hal ini konsisten dengan temuan Ardi & Suswanta (2025) yang menemukan bahwa dominasi pemerintah dalam kolaborasi (43%) dapat menghambat keseimbangan peran antaraktor.

3.2. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi politik dalam kolaborasi pentaheliks bagi pembangunan pariwisata Kota Sawahlunto belum berjalan secara optimal.

Kondisi ini sejalan dengan temuan Ardi & Suswanta (2025) bahwa pemerintah masih mendominasi kolaborasi pentaheliks, yang berimplikasi pada ketidakseimbangan peran antaraktor. Sama halnya dengan temuan Anwar, Surya & Resmawan (2022) bahwa strategi komunikasi pemerintah dalam pembangunan pariwisata cukup efektif meski masih terdapat kendala ketidaksesuaian pesan, kondisi serupa ditemukan di Kota Sawahlunto.

Berbeda dengan temuan Daryana & Yudhistira (2024) yang menemukan bahwa komunitas lokal dan regulasi pemerintah berperan paling dominan dalam mendorong keberlanjutan wisata halal, penelitian ini menemukan bahwa di Kota Sawahlunto, keterlibatan komunitas masih terbatas pada aspek implementasi dan belum optimal pada perencanaan. Hal ini mungkin disebabkan perbedaan karakteristik objek penelitian, yaitu kota tambang bersejarah yang memiliki dinamika sosial berbeda dibandingkan dengan destinasi wisata halal.

Temuan menarik dalam penelitian ini adalah bahwa pemanfaatan media sosial telah berkontribusi dalam meningkatkan citra destinasi wisata Sawahlunto, sebagaimana juga didukung oleh temuan Junaedi dkk (2025) yang menegaskan signifikansi media sosial dalam membentuk citra destinasi. Namun, efektivitasnya masih belum menjangkau seluruh segmen masyarakat, terutama kelompok yang kurang melek digital.

3.3. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Faktor penghambat komunikasi politik dalam kolaborasi pentaheliks di Kota Sawahlunto meliputi: (1) minimnya institusi pendidikan tinggi yang berdampak pada keterbatasan peran akademisi; (2) komunikasi yang belum terlembagakan sehingga masih bersifat situasional; (3) ketidakmerataan akses informasi digital antaraktor; dan (4) perbedaan kapasitas dan sumber daya antaraktor yang menghambat komunikasi yang setara.

Upaya yang telah dilakukan meliputi penguatan koordinasi internal melalui rapat rutin, pemanfaatan grup komunikasi digital, serta kerja sama dengan media lokal untuk penyebaran informasi resmi. Pemerintah juga aktif mengintegrasikan program pariwisata dengan *event* budaya yang menggerakkan seluruh unsur pentaheliks secara bersamaan.

Temuan-temuan tersebut memberikan implikasi penting bagi pengembangan teori komunikasi politik dan tata kelola kolaboratif. Secara teoretis, temuan ini menunjukkan bahwa kelima dimensi komunikasi politik Nimmo (2000) tidak berdiri sendiri-sendiri, melainkan saling memengaruhi: lemahnya institusionalisasi komunikator (akademisi yang belum terlibat) berdampak pada efek komunikasi berupa kesepahaman yang belum menyeluruh, sementara ketidakmerataan media memperlebar kesenjangan pemahaman pesan di kalangan khalayak. Hal ini memperkuat argumen bahwa efektivitas *collaborative governance* berbasis pentaheliks sangat bergantung pada kualitas komunikasi politik yang menjembatani relasi antaraktor, bukan hanya pada keberadaan forum kolaborasi semata. Secara praktis, temuan ini menegaskan bahwa tata kelola pembangunan pariwisata berbasis pentaheliks di kota warisan budaya seperti Sawahlunto memerlukan desain komunikasi yang lebih terstruktur, mencakup pelembagaan keterlibatan akademisi, standardisasi pesan antarinstansi, serta pemerataan akses media bagi seluruh segmen masyarakat, agar kolaborasi tidak bertumpu secara berlebihan pada inisiatif situasional pemerintah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi politik dalam kolaborasi pentaheliks pada pembangunan pariwisata Kota Sawahlunto belum terlaksana secara optimal. Meskipun komunikasi telah berlangsung melalui berbagai bentuk koordinasi dan media, efektivitasnya masih terkendala oleh dominasi pemerintah sebagai komunikator, keterlibatan akademisi yang belum optimal, belum konsistennya penyampaian pesan antaraktor, serta belum meratanya jangkauan komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Kondisi tersebut berdampak pada belum terbentuknya kesepahaman, kepercayaan, dan sinergi yang kuat di antara aktor pentaheliks.

Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi politik

kolaboratif tidak hanya ditentukan oleh intensitas komunikasi, tetapi juga oleh keseimbangan peran setiap aktor dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan pariwisata. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem komunikasi yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan partisipatif melalui forum komunikasi pentaheliks yang terstruktur, pelibatan akademisi secara formal, peningkatan kapasitas komunikasi antaraktor, serta penyusunan pesan yang konsisten agar kolaborasi pembangunan pariwisata di Kota Sawahlunto dapat berlangsung lebih efektif.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama berupa waktu penelitian yang relatif singkat serta lokus penelitian yang terbatas pada Kota Sawahlunto sehingga hasil tidak dapat digeneralisasi secara langsung pada kota sejenis.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyarankan tiga arah penelitian lanjutan yang lebih spesifik sesuai temuan penelitian ini. Pertama, penelitian kuantitatif yang mengukur efektivitas pemanfaatan media sosial (seperti akun @sawahluntotourism) terhadap peningkatan kesadaran dan kunjungan wisatawan, mengingat temuan ini menunjukkan kontribusi media sosial yang belum menjangkau seluruh segmen masyarakat secara merata. Kedua, pengembangan dan pengujian model komunikasi politik pentaheliks yang dapat diuji secara kuantitatif untuk mengidentifikasi dimensi komunikasi yang paling berpengaruh terhadap keberhasilan kolaborasi antaraktor. Ketiga, studi komparatif komunikasi politik pentaheliks pada kota-kota wisata berbasis warisan budaya lain di Indonesia, seperti kota tambang atau kota pusaka lainnya, untuk menguji sejauh mana temuan penelitian ini dapat digeneralisasi pada konteks yang berbeda.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kota Sawahlunto beserta seluruh informan yang telah memberikan kesempatan dan informasi bagi pelaksanaan penelitian ini, serta seluruh pihak yang selalu mendukung penyelesaian skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Afrizal. (2014). *Metode penelitian kualitatif: Sebuah upaya mendukung penggunaan penelitian kualitatif dalam berbagai disiplin ilmu.* RajaGrafindo Persada.

Ansell, C., & Gash, A. (2008). *Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543–571.* https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Anwar, A., Surya, I., & Resmawan, E. (2022). *Communication strategy of the East Kalimantan government on tourism development. Jurnal Studi Komunikasi* (Indonesian Journal of Communications Studies), 6(1), 73–88. https://doi.org/10.25139/jsk.v6i1.4112

Ardi, W. H., & Suswanta. (2025). *Pentahelix actor collaboration: A case study of government dominance and stakeholder engagement in North Lombok. INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication), 10(1), 949–968.* https://doi.org/10.18326/inject.v10i1.4608

Aribowo, H., Wirapraja, A., & Putra, Y. D. (2018). Implementasi kolaborasi model pentahelix dalam rangka mengembangkan potensi pariwisata di Jawa Timur serta meningkatkan perekonomian domestik. Jurnal MEBIS (Manajemen dan Bisnis), 3(1), 31–38. https://doi.org/10.33005/mebis.v3i1.21

Badan Pusat Statistik Kota Sawahlunto. (2023). *Sawahlunto dalam angka 2023.* BPS Kota Sawahlunto. https://sawahluntokota.bps.go.id

Badan Pusat Statistik Kota Sawahlunto. (2025). *Sawahlunto dalam angka 2025.* BPS Kota Sawahlunto. https://sawahluntokota.bps.go.id

Creswell, J. W. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Daryana, A. P., & Yudhistira, P. (2024). *Integration of the pentahelix concept in the*

development of tourism based halal culinary business. Business Innovation and Entrepreneurship Journal (BIEJ), 6(2), 133–140. https://doi.org/10.35899/biej.v6i2.944

Effendy, O. U. (2003). *Ilmu komunikasi: Teori dan praktek.* PT Remaja Rosdakarya.

Hidayat, D., Mulyadi, D., & Mulyana, A. (2025). Implementasi otonomi daerah terhadap pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. JISPENDIORA: Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora, 4(1), 476–488. https://doi.org/10.56910/jispendiora.v4i1.2372

Islamy, H. L. S. (2018*). Collaborative governance*: Konsep dan aplikasi. Deepublish

Junaedi, R. A., Rahmatullah, M. A., Anggoro, A. D., & Safira, J. Z. (2025). Peran media sosial dalam membentuk citra destinasi pariwisata Kabupaten Bondowoso. Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial, 6(1), 45–55. https://doi.org/10.36722/jaiss.v6i1.3933.

Labolo, M. (2014). *Memahami ilmu pemerintahan: Suatu kajian, teori, konsep dan pengembangannya.* Rajawali Pers.

McNair, B. (2011). *An introduction to political communication (5th ed.). Routledge.* https://doi.org/10.4324/9780203828694

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru* (T. Rohidi, Terjemahan). UI Press.

Nainggolan, M., Ardika, I. W., Ardhana, I. K., & Setiawan, I. K. (2020). *Pentahelix model application for tourism development strategy. International Journal of Linguistics, Literature and Culture, 6(2), 12–18.* https://doi.org/10.21744/ijllc.v6n2.864

Ndraha, T. (2003). *Kybernology: Ilmu pemerintahan baru* (Jilid 1 & 2). Rineka Cipta.

Nimmo, D. (2000). *Khalayak dan efek.* PT Remaja Rosdakarya

Nugroho, I., & Hilman, Y. A. (2020). Sinergitas Program "*Fantastic*! Ponorogo" dalam rangka pembangunan pariwisata berbasis *collaborative governance* di Kabupaten Ponorogo. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 10(1), 220–229. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v10i1.893

Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Sawahlunto Tahun 2019–2033.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014–2035.

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.

Salsabila, D. S. (2025). Pengembangan ekowisata dengan model pentahelix di Kampung Wisata Adat Malasigi Distrik Klayili Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya (Skripsi, Institut Pemerintahan Dalam Negeri). Repository Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Sari, D. M., & Purnomo, E. (2021). Efektifitas *usability sign system* tempat wisata Kota Sawahlunto sebagai kota wisata tambang berbudaya. *Gorga: Jurnal Seni Rupa, 10*(2), 254. https://doi.org/10.24114/gr.v10i2.24724

Soemaryani, I. (2016). *Pentahelix model to increase tourist visit to Bandung and its surrounding areas through human resource development. Academy of Strategic Management Journal, 15(Special Issue 2), 106–112.*

Sugiyono. (2022). *Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* Alfabeta.

Sukmadi. (2022). *The pentahelix model in synergizing sectors tourism in West Java to improve local economy. International Journal of Social Science, 2(4), 1873–1878.* https://doi.org/10.53625/ijss.v2i4.4165

Syafiie, I. K. (2013). *Ilmu pemerintahan.* Bumi Aksara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Weber, M. (2006). *Economy and society: An outline of interpretive sociology* (*G. Roth & C. Wittich, Eds.). University of California Press*. (Karya asli diterbitkan 1922)

Zerah, Tahirs, J. P., & Marchelin. (2024). Dampak ekonomi pariwisata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal di Ke'te Kesu. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, *4*(4). https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13963

Zis, S. F., Yonariza, Y., Tanjung, H. B., & Arief, E. (2024). Komunikasi Kelompok Sadar Pariwisata Dalam Pembangunan Berkelanjutan. Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau, 4(1), 98–110. https://doi.org/10.33701/jtpm.v4i1.3943

